



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



DISUSUN :
TAHUN 2020
Sub Bagian Program

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79 A Telp. (0751)34475-31554

PADANG

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2016-2021.

Untuk selanjutnya RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RENJA diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahunan ke depan.

Padang, Maret 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat



NAZWIR,SH,M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI . | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | 8 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol..... | 9 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 33 |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol... | 39 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 55 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... | 57 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 60 |
| 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol..... | 60 |
| 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020..... | 64 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| LAMPIRAN Tabel T.C.29 | 76 |
| Tabel T.C.30 | |
| Tabel T.C.31 | |
| Tabel T.C.32 | |
| Tabel T.C.33 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 pada tahun 2018 mengalami revisi dalam rangka penyempurnaan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini sebagaimana ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 juga telah dilakukan perubahan sebagai lanjutan dan penyempurnaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, mempedomani Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yaitu Meningkatnya Stabilitas Keamanan di Sumatera Barat. Pencapaian Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tersebut menjadi visi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 yaitu : **"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG AMAN, DEMOKRATIS, BERSATU, BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945"**, yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana kerja (renja) merupakan suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran untuk periode satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih. Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021.

Sebagai penjabaran satu tahunan dari Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021, Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menuangkan program dan kegiatan untuk mendukung capaian target tahun ke-empat Renstra 2016 - 2021. Program program urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk lima tahun adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba.

Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan memperhatikan Renja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Adapun program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Indikator kinerja program tersebut adalah penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam), jumlah konflik berlatar belakang isu SARA, dan persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi Sumatera Barat, Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian rancangan Renja SKPD. Surat edaran Gubernur tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) RKPD. Pada pasal 83 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga diamanatkan agar SKPD melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Renja SKPD. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang berencana akan melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 6-7 Februari 2019 di Kota Padang, tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19, dimana pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang untuk meminimalkan penyebaran covid-19.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- 8) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
- 9) Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019.
- 10) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
- 11) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 ;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 ;

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 ;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.
- 17) Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/652/XII/Ren.Makro/Bappeda-2019 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- 18) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
- 19) Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/SK/Set-BKPol/2019 tentang Penetapan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ;
- 20) Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/SK/Set-BKPol/2019 tentang Penetapan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka satu tahun sesuai visi dan misi serta penetapan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar.

b) Tujuan

Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang pengertian Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja K/L

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2019) dan capaian Renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, rumusan telaahan terhadap kebijakan nasional dan program kegiatan yang diusulkan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan pokok-pokok kebijakan prioritas program nasional yang terkait arah kebijakan daerah dengan Tupoksi Badan Kesbangpol Prov Sumbar

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesbangpol

Menjelaskan penjelasan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 Badan Kesbangpol Prov Sumbar.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan penunjang yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

5.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kesbangpol

Bagian ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Menguraikan kaidah-kaidah dalam rangka sinkronisasi sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Memuat penjelasan faktor-faktor tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut diatur dalam PP nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun berupa non fisik.

3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu kinerja output dan kinerja keuangan. Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk kinerja keuangan, dari rancangan renja awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.471.000.000- (lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang disetujui di renja akhir sebanyak 10 (sepuluh) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.530.985.482 (empat milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Pada perubahan anggaran mengalami penambahan anggaran menjadi Rp.6.658.985.482,- (enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah program sebanyak 10 (sepuluh) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan.

Dari 10 (sepuluh) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan tersebut dengan pagu anggaran sebesar **Rp.6.658.985.482,-** (Enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) terealisasi sebesar **Rp.6.510.963.435,-** atau **97,78 %**. dengan realisasi fisik sebesar **99,28%**.

Untuk mengukur kinerja output program/kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Kesbangpol sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.1

Indikator Kinerja untuk mengukur kinerja output program/kegiatan

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--------|
| 1 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB |
| 2 | Jumlah konflik sosial di Sumbar | <5 |
| 3 | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5% |
| 4 | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 72 |

D

A. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Target dan realisasi kinerja output program dan kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**” diuraikan pada tabel berikut

Tabel II.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Output Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja

“Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”

| No | Program/Kegiatan | Target Kinerja Output | Realisasi Kinerja Output | % Realisasi |
|----|--|-----------------------|--------------------------|-------------|
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor | 11 orang | 11 orang | 100% |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 156 eks | 156 eks | 100% |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 10 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| II | Program Peningkatan Sarana | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | dan Prasarana Aparatur | | | |
| 1 | Pengadaan peralatan studio komunikasi dan informasi | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| 2 | Pemeliharaan rutin/ berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi | 5 unit | 5 unit | 100% |
| 3 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 3 paket | 3 paket | 100% |
| 4 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 7 unit | 7 unit | 100% |
| 5 | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan kantor | 15 unit | 15 unit | 100% |
| 6 | Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi | 27 unit | 27 unit | 100% |
| 7 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 100% |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 45 stel | 45 stel | 100% |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 17 orang | 17 orang | 100% |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|
| 2 | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | 6 dokumen | 6 dokumen | 100% |
| 3 | Penatausahaan keuangan SKPD | 30 orang | 30 orang | 100% |
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| 5 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | 4 orang | 4 orang | 100% |

Adapun realisasi capaian indikator kinerja “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**” untuk tahun keempat (tahun 2019) RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.3

Realisasi capaian indikator kinerja “*Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*”

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Tahun Keempat RPJMD (2019) | Realisasi Kinerja Tahun Keempat RPJMD (2019) | Program Pendukung |
|----|---|-------------------------------------|---|---|--|---|
| I | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB (76) | B (67,66) | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
|--|--|--|--|--|--|---|

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun 2018 (yang dirilis oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Mei 2019) adalah pada kategori **B** dengan pengertian **Baik**, dengan skor 67,66. Adapun akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dinilai baik dan telah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan memerlukan sedikit perbaikan, dengan pembobotan sebagai berikut :

- 1) Nilai hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja adalah 25,40%
- 2) Nilai hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja adaah 15,83%
- 3) Nilai hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja adalah 10,78%

Meskipun bernilai baik, namun capaian nilai AKIP Badan Kesbangpol Prov. Sumbar belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan yaitu BB (76). Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum adanya reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Faktor lainnya diantaranya belum adanya inovasi dan prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2019.

B. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar

Target dan realisasi output program dan kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar” dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.4

Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

yang mendukung pencapaian indikator kinerja

“Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar”

| No | Program/Kegiatan | Target Kinerja Output | Realisasi Kinerja Output | % Realisasi |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| I | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 80% | 80% | 80% |
| 1 | Penanganan masalah strategis daerah | 2 kali rapat | 0 kali rapat | 0% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 2 | Pengawasan orang asing | 3 kali rapat | 3 kali rapat | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| | | 1 Ranpergub | 1 Ranpergub | 100% |
| 3 | Pengawasan pencegahan konflik sosial | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| | | 1 buku pemetaan potensi konflik | 1 buku pemetaan potensi konflik | 100% |
| 4 | Pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat | 4 kali rapat tim FKDM | 4 kali rapat tim FKDM | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | |
| 5 | Rapat Koordinasi Ketahanan | 1 kali rakor | 1 kali rakor | 100% |

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------|
| | Ekonomi dan Budaya | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 6 | Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial | 5 kali rapat timdu PKS | 5 kali rapat timdu PKS | 100% |
| | | 1 kali rakor Timdu | 1 kali rakor Timdu | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| | | 3 laporan rencana aksi | 3 laporan rencana aksi | 100% |
| 7 | Pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 8 | Forum Diskusi Pimpinan Daerah | 1 kali rapat | 1 kali rapat | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 9 | Forum Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar | 1 kali rakor | 1 kali rakor | 100% |
| 10 | Sosialisasi dan Sinkornisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar | 1 kali sosialisasi | 1 kali sosialisasi | 100% |
| II | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 80% | 80% | 80% |
| 1 | Sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan | 1 kali sosialisasi | 1 kali sosialisasi | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 2 | Forum pemantapan wawasan kebangsaan | 10 kali | 10 kali | 100% |
| 3 | Pembinaan dan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|------|
| 4 | Penguatan wawasan bela negara | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | | 2 kali rapat | 2 kali rapat | 100% |
| 5 | Sosialisasi pewarisan nilai nilai luhur bangsa | 1 kali | 1 kali | 100% |
| 6 | Penguatan forum pembauran kebangsaan | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | | 2 kali rapat | 2 kali rapat | 100% |
| 7 | Pembinaan dan koordinasi pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | 2 kali rapat | 2 kali rapat | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| | | 2 FPK kab/kota | 2 FPK kab/kota | 100% |
| | | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| 8 | Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental | 1 kali sosialisasi | 1 kali sosialisasi | 100% |
| | | 1 kali rapat GNRM | 1 kali rapat GNRM | 100% |

Adapun realisasi capaian indikator kinerja “Jumlah Konflik Sosial di Sumbar” untuk tahun keempat (tahun 2019) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.5

Realisasi capaian indikator kinerja “Jumlah Konflik Sosial di Sumbar” Tahun 2019

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2019) | Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2019) | Program Pendukung |
|----|---|--|---------------------------------|--|---|--|
| I | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan | Jumlah konflik sosial di Sumbar | <5 | 3 | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|--|--|--|--|
| | Barat | ketertiban masyarakat | | | | Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan |
|--|-------|-----------------------|--|--|--|--|

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah konflik sosial di Sumbar dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat 4 jenis konflik yang dikategorikan sebagai konflik sosial yang diukur dari tahun ke tahun yaitu konflik SARA, perbatasan, tanah ulayat/lahan dan konflik Sumber Daya Alam.

Jenis dan lokasi terjadinya konflik pada tahun 2019 berbeda dengan jenis dan lokasi konflik yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, terjadi 2 konflik di Sumatera Barat yang keduanya merupakan konflik sumber daya alam. Konflik ini terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Di Kabupaten Pasaman, terjadi konflik antar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pasaman dengan masyarakat Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik ini dipicu adanya kegiatan tambang emas oleh PT Inexo Jaya Mandiri (IJM). Sedangkan di Kabupaten Solok, terjadi konflik antara masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang dengan pemerintah kabupaten Solok, kepolisian resor (Polres) Arosuka, serta PT HDE.

Konflik ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Sejak awal, masyarakat Nagari Salingka Gunung Talang telah melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan geothermal tersebut.

Kedua konflik yang terjadi pada tahun 2018 tersebut sudah dapat diselesaikan dan dimediasi oleh pihak-pihak terkait sehingga pada tahun ini tidak terjadi lagi aksi anarkisme yang berujung pada pengrusakan atau kerugian bagi masyarakat sekitar.

Adapun pada tahun 2019, terjadi 3 konflik sosial yang dikategorikan konflik Sumber Daya Alam, Konflik Lahan dan Konflik Perbatasan. Sumber data diperoleh dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Adapun rangkuman dari konflik yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2019 yaitu :

- 1) Aksi perusakan kendaraan dinas oleh masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar pada kegiatan operasi penerbitan alat tangkap bagan dan keramba jaring apung (KJA) di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 November 2019.
- 2) Perusakan tapal batas Nagari Kepencong Lubuk Gambir (Kapelgam) dengan Koto Baru oleh masyarakat Nagari Kapelgam terkait peristiwa kepemilikan lahan. Peristiwa ini terjadi di Nagari Keponcolng Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 26 November 2019.
- 3) Bentrok antar warga Nagari Sumpur dengan warga Bungo Tanjung terkait persoalan tapal batas nagari dipicu oleh pemancangan tanah di daerah tapal batas oleh warga Bungo Tanjung yang diprotes oleh warga nagari Sumpur, mengakibatkan 3 orang terluka akibat senjata tajam dan dilarikan ke RSUD Padang Panjang, 1 dirujuk ke RSUD M.Djamil Padang. Peristiwa ini terjadi di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 5 Desember 2019.

Dilihat dari tingkat capaiannya, jumlah konflik sosial tahun 2019 melebihi jumlah target jumlah konflik sosial yang ditetapkan (<5). Capaian ini menunjukkan bahwa peran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dikatakan berhasil yang ditandai dengan jumlah konflik sosial yang terjadi di Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir kurang dari 5 kasus (<5)

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran tim dan forum-forum strategis yang dibentuk oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebagai wadah informasi, komunikasi dan konsultasi dalam mendeteksi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul di daerah diantaranya permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan

budaya. Koordinasi yang intensif dengan Forkopimda Provinsi, Kominda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi terkait juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka memberikan rekomendasi terkait persoalan-persoalan di daerah khususnya persoalan yang bisa memicu terjadinya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

Adapun nama tim dan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Barat diantaranya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Pengawasan Orang Asing, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Diskusi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Koordinasi Pengawasan Terorisme (FKPT) dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Tim dan Forum-Forum tersebut merupakan mitra dari Kesbangpol untuk menyaring semua potensi kerawanan yang ada di daerah.

Pembentukan tim dan forum strategis tersebut tentunya merupakan amanat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permendagri terkait tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah. Untuk penanganan konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik., PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Selain didukung oleh tim dan forum-forum strategis tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat juga didukung dengan adanya sosialisasi atau pembinaan bagi masyarakat diantaranya generasi muda, pelajar, etnis/paguyuban, wali nagari, bamus, pengurus KAN, Bundo Kandung tentang ideologi

dan wawasan kebangsaan yang saat ini mulai memudar. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya gesekan-gesekan di masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik SARA.

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat ini merupakan amanat dari Permendagri diantaranya Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi, Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah dan Inpres RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Adapun target dan realisasi kinerja output program dan kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar**” dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.6

**Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019
yang mendukung pencapaian indikator kinerja
“Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar”.**

| No | Program/Kegiatan | Target Kinerja Output | Realisasi Kinerja Output | % Realisasi |
|----|---|-----------------------|--------------------------|-------------|
| I | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 80% | 80% | 80% |
| 1 | Pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat | 4 kali | 4 kali | 100% |
| II | Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | 80% | 80% | 80% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------|
| 1 | Sosialisasi pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba | 1 kali | 1 kali | 100% |
| 2 | Sosialisasi Perda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba | 1 kali | 1 kali | 100% |
| 3 | Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | 1 kali upacara HANI | 1 kali upacara HANI | 100% |

realisasi capaian indikator kinerja “**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar**” untuk tahun keempat (tahun 2019) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.7

Realisasi capaian indikator kinerja

“**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar**” Tahun 2019

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2019) | Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2019) | Program Pendukung |
|----|---|--|---|--|---|---|
| I | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase angka kriminalitas di Sumbar | 5% | 13,64% | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat |

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui bahwa persentase penurunan angka kriminalitas untuk tahun 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 adalah sebesar 13,64%. Angka ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 5%. Dilihat dari jumlah kasusnya, terjadi penurunan kasus angka kriminalitas di Sumbar sebanyak 1.459 kasus dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 (dirilis pada tahun 2019), jumlah kasus kriminalitas di Sumbar sebanyak 9.236 kasus sedangkan

pada tahun 2017 (dirilis tahun 2018) jumlah kasus kriminalitas di Sumbar sebanyak 10.695 kasus.

Kasus-kasus kejahatan di Sumbar yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan angka kriminalitas tersebut diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembakaran/kebakaran, perkosaan, pembunuhan, penipuan, perusakan, kejahatan terkait narkoba dan psikotropika dan kasus penganiayaan.

Adapun perbandingan jumlah kenaikan atau penurunan masing-masing kasus tersebut dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.8
Perbandingan Jumlah Angka Kriminalitas di Sumatera Barat
Tahun 2018-2019

| No | Kasus | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|--------------|--|---------------|--------------|
| 1 | Curat | 3.034 | 2.471 |
| 2 | Curas | 512 | 387 |
| 3 | Curanmor | 2.975 | 2.379 |
| 4 | Pembakaran/Kebakaran | 23 | 0 |
| 5 | Perkosaan | 54 | 31 |
| 6 | Pembunuhan | 14 | 14 |
| 7 | Penipuan | 967 | 974 |
| 8 | Perusakan | 451 | 21 |
| 9 | Kejahatan terkait narkoba dan psikotropika | 592 | 806 |
| 10 | Penganiayaan | 2.073 | 2.153 |
| Total | | 10.695 | 9.236 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas di Sumbar dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor. Adapun peran Kesbangpol untuk menurunkan angka kriminalitas di Sumatera Barat diantaranya :

1. Adanya sosialisasi dan pembekalan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol bagi masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda yang di beberapa daerah di Sumbar sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat serta pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumbar. Hal ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Disusunnya Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yaitu Perda No 9 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 sabagai tindak lanjut Permendagri No 21 tahun 2013. Perda ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan Napza di Sumbar dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah baik dalam bentuk antisipasi dini, pencegahan, fasilitasi rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan serta partisipasi masyarakat.
3. Adanya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

Adapun target dan realisasi kinerja output program dan kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “**Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**” dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.9

Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

yang mendukung pencapaian indikator kinerja

“Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar”.

| No | Program/Kegiatan | Target Kinerja Output | Relisasi Kinerja Output | % Realisasi |
|----|---|------------------------|-------------------------|-------------|
| I | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 80% | 80% | 80% |
| 1 | Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | 1 kali rapat pokja IDI | 1 kali rapat pokja IDI | 100% |
| | | 1 kali sosialisasi | 1 kali sosialisasi | 100% |
| 2 | Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab/Kota di Sumbar | 3 kali | 2 kali | 67% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum | 8 kali rapat | 6 kali rapat | 75% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 4 | Pengelolaan bantuan keuangan partai politik | 20 kali | 20 kali | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 5 | Bintek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik | 1 kali | 1 kali | 100% |
| 6 | Sosialisasi dan pembinaan ormas | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 7 | Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | | 19 kab/kota | 19 kab/kota | 100% |
| 8 | Dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat | 2 kali | 2 kali | 100% |

Realisasi capaian indikator kinerja “**Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar**” untuk tahun keempat (tahun 2019) RPJMD Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.10

Realisasi capaian indikator kinerja

“Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar” Tahun 2019

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2019) | Realisasi Kinerja Tahun Ketiga RPJMD (2019) | Program Pendukung |
|----|---|---|---|--|---|---------------------------------------|
| I | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat | 72 | 67,06 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama *stakeholder* lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

(KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 ini.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IDI Sumbar tahun 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 adalah **67,06**, angka ini turun 2,44 poin dibandingkan dengan IDI di Sumatera Barat tahun sebelumnya yaitu sebesar **69,50**. Dengan penurunan ini maka tingkat demokrasi di Sumatera Barat pada tahun terakhir masih tetap berada pada kategori “sedang.” . Penyebab utama penurunan Indeks Demokrasi Indonesia antara lain Perda inisiatif DPRD terhadap total Perda menurun, kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender,etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat meningkat dan jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.

Angka IDI 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni **aspek kebebasan sipil** dengan rata-rata Sumatera Barat 55,32; **aspek hak-hak politik** sebesar 62,84 dan **aspek lembaga demokrasi** sebesar 88,52. Secara lebih rinci, di tahun 2018 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, mengalami penurunan sebesar 6,34 poin, aspek hak-hak politik mengalami kenaikan 1,76 poin dan aspek lembaga demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 4,20 poin. Hal-hal ini menggambarkan tingkat dinamika demokrasi di Sumatera Barat.

Dilihat dari segi variabel IDI, pada tahun 2018 terdapat **tiga variabel IDI di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan, empat variabel mengalami penurunan dan empat variabel tidak mengalami perubahan**. Dari tiga variabel yang mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada **variabel Kebebasan berpendapat** yang naik sebesar 16,68 poin; diikuti oleh **variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan** sebesar 3,52 poin. Empat variabel yang mengalami penurunan adalah **variabel kebebasan berkumpul dan berserikat** dimana terjadi penurunan sebesar 43,75 poin, **variabel kebebasan dan diskriminasi** turun sebesar 19,25 poin, **variabel peran birokrasi pemerintahan daerah** turun sebesar 15,63 poin.

Poin terendah terjadi pada **variabel peran DPRD** yaitu sebesar 3,31. Sedangkan empat variabel (Hak memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, dan Peran Peradilan yang Independen) tidak mengalami perubahan atau tetap.

Selanjutnya, dari sisi indikator, pada IDI 2018 terdapat 18 indikator yang bernilai baik” (indikator dengan skor di atas 80). Namun, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (indikator di bawah skor 60). Berbagai indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.11

Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator 2017 - 2018

| ASPEK/VARIABEL /INDIKATOR | | 2017 | 2018 |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| | INDEKS DEMOKRASI INDONESIA | 69,50 | 67,06 |
| A | KEBEBASAN SIPIL | 61,66 | 55,32 |
| I | Kebebasan berkumpul dan berserikat | 100 | 50 |
| 1 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100 | 100 |
| 2 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100 | 100 |
| II | Kebebasan berpendapat | 83,33 | 100 |
| 3 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 87,50 | 100 |
| 4 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 62,50 | 100 |
| III | Kebebasan berkeyakinan | 38,43 | 39,08 |
| 5 | Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 13,04 | 21,74 |
| 6 | Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 100 | 75 |
| 7 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait | 100 | 85 |

| | | | |
|----------|---|--------------|--------------|
| | dengan ajaran agama | | |
| IV | Kebebasan dari diskriminasi | 96,53 | 77,28 |
| 8 | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100 | 100 |
| 9 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 87,50 | 87,50 |
| 10 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100 | 41,67 |
| B | HAK-HAK POLITIK | 61,08 | 62,84 |
| V | Hak memilih dan dipilih | 74,12 | 74,12 |
| 11 | Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 100 | 100 |
| 12 | Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60 | 60 |
| 13 | Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 76,31 | 76,31 |
| 14 | Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turn out) | 68,43 | 68,43 |
| 15 | Perempuan terpilih di DPRD Provinsi | 35,90 | 35,90 |
| VI | Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan | 48,03 | 51,56 |
| 16 | Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 45,65 | 43,48 |
| 17 | Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 50,41 | 59,63 |
| C | LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI | 92,72 | 88,52 |
| VII | Pemilu yang bebas dan adil | 100 | 100 |
| 18 | Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100 | 100 |
| 19 | Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 100 | 100 |
| VIII | Peran DPRD | 71,36 | 68,05 |
| 20 | Skor alokasi anggaran pendidikan | 100 | 100 |
| | Skor alokasi anggaran kesehatan | 30,77 | 9,52 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| 21 | Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD | 3,57 | 3,57 |
| 22 | Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 7,,14 | 3,57 |
| IX | Peran Partai Politik | 100 | 100 |
| 23 | Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 100 | 100 |
| 24 | Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 100 | 100 |
| X | Peran Birokrasi Pemerintah Daerah | 92,78 | 77,15 |
| 25 | Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 84,21 | 50 |
| 26 | Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 100 | 100 |
| XI | Peran Peradilan Yang Independen | 100 | 100 |
| 27 | Keputusan hakim yang kontroversial | 100 | 100 |
| 28 | Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100 | 100 |

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk menaikkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol, Kesbangpol berperan penting dalam menaikkan nilai IDI di Sumbar khususnya pada aspek hak-hak politik. Sedangkan 2 aspek lainnya yaitu aspek kebebasan sipil dan aspek lembaga-lembaga demokrasi perlu peranan dan upaya serius dari pihak-pihak lainnya yang mempunyai kontribusi atau kewenangan dalam mengambil kebijakan atau melakukan aksi/tindakan yang dapat menaikkan nilai dari masing-masing indikator pada kedua aspek tersebut.

Adapun langkah dan upaya yang dilakukan Kesbangpol untuk menaikkan nilai IDI di Sumbar diantaranya :

1. Melakukan penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui rapat tim Pokja IDI dengan melibatkan pihak-pihak terkait
2. Melakukan sosialisasi bagi aparatur tentang hasil Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar
3. Melakukan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dan perempuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu

4. Melakukan pemantauan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut diantaranya :
 - a. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknsi PPK dan PPS
 - b. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - c. Pencalonan
 - d. Kampanye
 - e. Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - f. Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara

Namun,dalam upaya mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai IDI di Sumbar, terdapat beberapa hambatan atau kendala diantaranya :

1. Belum optimalnya peran Pokja (Pokja) IDI di Sumatera Barat
2. Minimnya alokasi anggaran untuk mendorong peningkatan nilai IDI di Sumbar
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar
4. Adanya tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Dari penjelasan di atas, realisasi kinerja keuangan dan output untuk keseluruhan program yang tertuang pada Renja Badan Kesbangpol tahun 2019 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.12

Capaian Kinerja Keuangan dan Output Keseluruhan Program pada Renja 2019 untuk mendukung Capaian IKU Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2019.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Program Pendukung | Realisasi Keuangan | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|--|--------------------|---------|
| | | | | | | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (76) | B (67,66) | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 98,98 |
| | | | | | Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 97,58 |
| | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 100 | 91,83 |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 99,29 |
| | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|--------|--|-------|-------|
| | | | | | Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 98,41 |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Jumlah konflik sosial di Sumbar | <5 | 3 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 96,40 | 97,97 |
| | | | | | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 100 | 98,41 |
| | | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5% | 13,64% | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 100 | 98,31 |
| | | | | | Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | 100 | 96,97 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----|-------|---------------------------------------|-------|-------|
| 3 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | 72 | 67,06 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 99,42 | 93,95 |
|---|---------------------------------------|--|----|-------|---------------------------------------|-------|-------|

Dari tabel di atas disimpulkan hal hal sebagai berikut :

- a) Dari 10 program yang dilaksanakan tahun 2019, sebanyak 9 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Sarana dan Pra Sarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba tercapai outputnya 100% sebagaimana yang ditargetkan.
- b) Terdapat 1 program yang tidak mencapai 100% yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (97,97%). Capaian program ini tidak mencapai 100% disebabkan karena salah satu kegiatan pada program ini tidak dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah. Kegiatan penanganan masalah strategis daerah memiliki target output terlaksananya 2 kali rapat dengan Kominda dan Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah, namun rapat tidak terlaksana sama sekali sehingga realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 62,50%.
- c) Untuk capaian indikator sasaran nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 belum mencapai target. Target nilai AKIP Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2019 adalah BB (74), sedangkan realisasi nilai AKIP tahun 2019 adalah B (67,66).
- d) Untuk indikator sasaran jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2019, capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Target jumlah konflik sosial di Sumbar tahun 2019 adalah kurang dari 5 kasus, sedangkan realisasinya adalah 3 kasus. Untuk indikator sasaran persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2019, capaiannya melebihi

target yang ditetapkan. Target persentase penurunan angka kriminalitas tahun 2019 adalah sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 13,64%.

- e) Untuk capaian indikator sasaran nilai IDI Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan. Target nilai IDI Sumbar tahun 2019 adalah 72, sedangkan realisasinya adalah 67,06 (level demokrasi sedang).

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2020

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renja Tahun 2020, yang mencakup alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 yaitu Rp. 5.921.000.000,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), untuk membiayai 5 program belanja langsung pokok dengan 28 kegiatan dan 5 program belanja langsung urusan dengan 28 kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.13

**Gambaran perkiraan capaian Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Tahun 2020**

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Program | Target Tahun 2019 (tahun keempat Renstra) | Perkiraan Capaian |
|----|-------------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% |
| | | | 2. Program Peningkatan Sarana dan | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Displin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% 100% 100% | 100% 100% |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | Jumlah konflik sosial di Sumbar | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. | 100% 100% | 100% 100% |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|
| | | Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 1. Program Pencegahan Penanganan Rehabilitasi Narkoba. 2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 100% 100% | 100% 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 100% | 100% |

Untuk perkiraan capaian tahun 2020, seluruh program belanja langsung pokok yang terdiri dari lima program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%. Sedangkan untuk program belanja langsung urusan yang terdiri dari lima program, diperkirakan dapat dicapai sebesar 100%, sesuai dengan target tahun keempat dalam Renstra 2016 – 2021.

Adapun perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sesuai target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.14

Perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2020 sesuai target RPJMD Prov. Sumbar

Tahun 2016 – 2021

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja Tahun Keempat RPJMD (2019) | Program Pendukung |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| I | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai SAKIP | BB | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|---|
| | | | | | Keuangan |
| 2 | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas | <5 5% | 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan |
| 3 | Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 74 | Program Pendidikan Politik Masyarakat, |

2.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sinkronisasi terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2019 dan perkiraan capaian Tahun 2020. Tercapai atau tidaknya target Renstra yang telah ditetapkan didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Tahun 2020. Adapun realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan tahun sebelumnya (tahun 2018) dikaitkan dengan target Renstra sebagaimana yang tertuang dalam laporan kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.15

Realisasi Program Kegiatan Pelaksanaan Renja dikaitkan dengan Renstra

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Sasaran Tahun 2019 | Capaian Tahun 2018 | Capaian Tahun 2019 | Program Yang Mendukung Sasaran |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (76) | B (62,50) | B (67,66) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | Meningkatnya | Jumlah | <5 | 2 | 3 | 1. Program Peningkatan |

| | | | | | | |
|--|--|---|----|-------|--------|---|
| | keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat | konflik sosial di Sumbar Persentase penurunan angka kriminalitas | 5% | 8,5% | 13,64% | Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 4. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba |
| | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar | 72 | 69,50 | 67,06 | 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat |

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas di antaranya :

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2019, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tingkat realisasi kinerja outputnya di bawah 100% yaitu kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah. Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah realisasi kinerja outputnya sebesar 62,50% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,73%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat-rapat penanganan masalah strategis daerah oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar berkaitan dengan pelaksanaan rapat-rapat oleh Komite Intelijen Daerah (Kominda) Sumbar yang dilaksanakan setiap bulan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sumbar. Berdasarkan hasil rapat-rapat Kominda Sumbar yang dilaksanakan setiap bulan tersebut, tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan dirapatkan secara lebih lanjut oleh pemerintah daerah sehingga rapat penanganan masalah strategis daerah tidak dilaksanakan.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2019, dari 54 (lima puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 53 (lima puluh tiga) kegiatan yang mencapai realisasi target kinerja 100%

3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2019, tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Ada kegiatan yang sifatnya tergantung pada ada/tidaknya konflik yang terjadi
2. Ada kegiatan yang anggarannya di perubahan anggaran sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran karena terbatasnya waktu

3. Ada kegiatan yang pelaksanaannya tergantung dari permintaan stakeholder sehingga realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan.
4. Adanya perubahan kewenangan tupoksi Kesbangpol sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan terhadap target capaian program Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Dalam upaya pencapaian sasaran target kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Pencapaian Renstra Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016 untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik

- c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan
- e. Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat :
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1). Sub Bagian Keuangan
 - 2). Sub Bagian Program
- 4. Bidang Ideologi dan Wasbang :
 - 1). Sub Bidang Bina Ideologi
 - 2). Sub Bidang Bina Wasbang
- 5. Bidang Kewaspadaan :
 - 1). Sub Bidang PAM dan Waspadnas
 - 2). Sub Bidang Penanganan Konflik
- 6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 - 1). Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
 - 2). Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya & Agama

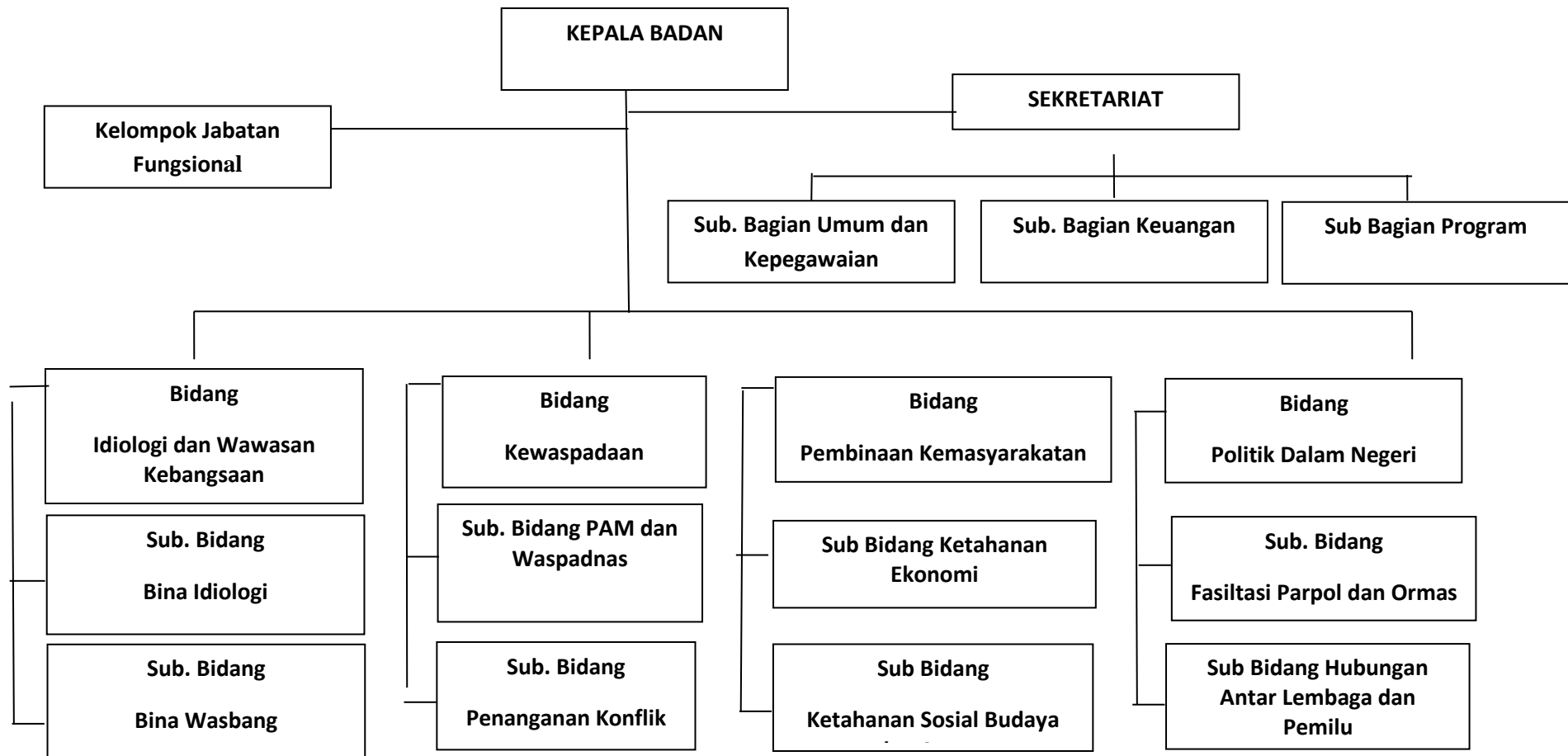
7. Bidang Politik Dalam Negeri :

- 1). Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
- 2).Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Stuktur organisasi tersebut dapat dapat digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan tugas dan pokok dan fungsi di atas, untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kunci (IKK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan sasaran/target dan indikator kinerja pada periode sebelumnya dapat dijelaskan pada **tabel T-C-30** (terlampir).

Berdasarkan tabel T-C-30, pada umumnya, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek yaitu :

1. Terlaksananya dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat
2. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi
3. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap ormas
5. Terlaksananya sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang politik
6. Terlaksananya bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
7. Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
8. Terpenuhinya jumlah keanggotaan (kursi) DPRD kabupaten/kota di Sumbar

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung dengan tugas dan fungsinya, seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel II.16

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | Hasil penilaian akuntabilitas kinerja (AKIP) Badan Kesbangpol Prov.Sumbar yang dikeluarkan oleh Inspektorat | Inspektorat |
| 2 | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | Jumlah konflik di Sumbar terkait dengan masalah perbatasan, tanah ulayat, konflik SDA dan konflik SARA pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Rasio penurunan angka kriminalitas di Sumbar pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. | Badan Kesbangpol Polda Sumbar |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | Nilai yang menunjukkan tingkat/kualitas Demokrasi di Sumbar | Badan Pusat Statistik |
| 4 | Meningkatnya partipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada | Rasio/perbandingan jumlah partipasi masyarakat dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilukada | KPU |
| 5 | Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penanganan konflik | Persentase potensi konflik yang sosial,budaya dan ekonomi yang dapat diredam | Rasio/perbandingan jumlah potensi konflik sosial,budaya dan ekonomi yang dapat diredam dengan jumlah konflik sosial,budaya dan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun | Badan Kesbangpol |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol dan hal kritis terkait dengan pelayanan.

Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata public. Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai

jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pengaduan dan keluhan baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun media cetak atau elektronik. Di sisi lain, masyarakat sendiri pun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan public terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari segi aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas.

Ditinjau dari sinergitas program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar dalam rangka pencapaian pembangunan, program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maupun instansi kesbangpol kabupaten/kota belum seluruhnya sinergis.

Sesuai dengan Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2019 memiliki 1 program yang dijabarkan ke dalam 6 kegiatan. Program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang tertuang dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah **“Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”** dengan sasaran program yaitu **meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.**

Program ini dijabarkan ke dalam 6 kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.

- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.
- e. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melaksanakan 10 program yang dijabarkan ke dalam 54 kegiatan. Program yang dilaksanakan antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan 8 kegiatan yaitu :
 - 1. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

2. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
 3. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
 4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
 5. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
 6. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 7. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Bara
 8. Penguatan Wawasan Bela Begara
- g. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan 8 kegiatan yaitu :
1. Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
 2. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
 3. Dialog Politik bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat
 4. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum
 5. Pergantian Antar Waktu Anggota DPD Kabupaten/Kota di Sumbar
 6. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
 7. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
 8. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
- h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat
- i. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan 10 kegiatan yaitu
1. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya
 2. Penanganan Masalah Strategis Daerah
 3. Pengawasan Orang Asing
 4. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 5. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme,
 6. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
 7. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar
 8. Forum Diskusi Pimpinan Daerah

9. Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
10. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar
- j. Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, dengan 3 kegiatan yaitu :
 1. Sosialisasi Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 2. Sosialisasi Perda tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
 3. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)

Dilihat dari sinergitas program kegiatan, secara umum sudah terwujud sinergitas program dan kegiatan antara Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk Kesbangpol Kabupaten/Kota, terdapat 10 dari 19 kabupaten/kota yang program kegiatannya tidak terakomodir untuk mendukung program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diantaranya Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan untuk 9 kabupaten/kota yang lain, program dan kegiatannya sudah sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tabel II.17

Sinergitas perencanaan/pelaksanaan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik, antara Pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota.

| No | Kabupaten/Kota | Sinergitas program/kegiatan dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | | Keterangan |
|----|---------------------------|---|-------|--|
| | | Ya | Tidak | |
| 1 | Kota Padang | | √ | Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya |
| 2 | Kabupaten Padang Pariaman | | √ | Belum ada program yang mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,serta politik dalam negeri |
| 3 | Kota Pariaman | | √ | Belum ada program yang mendukung kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi dan budaya, bina idiologi, karakter dan wawasan kebangsaan |
| 4 | Kota Padang Panjang | | √ | Belum ada program yang mendukung ketahanan ekonomi dan budaya, |
| 5 | Kota Bukittinggi | √ | | |
| 6 | Kabupaten Agam | √ | | |
| 7 | Kabupaten Tanah | √ | | |

| | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|
| | Datar | | | |
| 8 | Kota Payakumbuh | √ | | |
| 9 | Kabupaten 50 Kota | √ | | |
| 10 | Kabupaten Solok | | √ | Belum ada program yang mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan budaya |
| 11 | Kota Solok | √ | | |
| 12 | Kabupaten Sijunjung | | √ | Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas |
| 13 | Kota Sawahlunto | | √ | Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas |

| | | | | |
|----|------------------------------|---|---|---|
| 14 | Kabupaten Pesisir Selatan | √ | | |
| 15 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | | √ | Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas |
| 16 | Kabupaten Pasaman | √ | | |
| 17 | Kabupaten Dhamasraya | | √ | Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dan kewaspadaan nasional |
| 18 | Kabupaten Solok Selatan | √ | | |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---|---|
| 19 | Kabupaten Pasaman Barat | | √ | Belum ada program yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ormas |
|----|----------------------------|--|---|---|

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan implementasi dari tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui capaian visi dan misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saja tetapi perlu dukungan dari semua SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah. Apabila permasalahan tersebut baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman serta

alat mengasah kemampuan. Secara kuantitas juga kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu yang ditetapkan. Keterbatasan kemampuan juga memberikan andil tertundanya percepatan kegiatan dan bisa jadi pemahaman substansi kegiatan juga dapat berbeda dan pada akhirnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

b. Alokasi anggaran yang kurang memadai

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

c. Sarana dan prasarana kerja yang terbatas

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan pra sarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan pra sarana yang kurang memadai. Pada akhirnya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

2. Hambatan Eksternal

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol antara lain :

1. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
2. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama, tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis
3. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilukada/pemilu.
5. Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada. Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya keamanan daerah, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar perlu meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Selain itu, perlu koordinasi yang intensif

dengan jajaran Forkopimda dan Tim Kominda Sumbar untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

6. Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kasus maksiat di Sumbar.
7. Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang dapat mengganggu pesatuan dan kesatuan bangsa.
8. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian rogram nasional/internasional (NSPK, SPM dan SDG's).

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “**Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera**”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu 1). *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*, 2). *Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional*, 3). *Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter dan berkualitas tinggi*, 4). *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah*, 5). *Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan*.

Untuk mencapai misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, ditetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai. Terdapat 2 (dua) sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 untuk mendukung misi 1 yang menjadi tanggung jawab Badan

Kesbangpol yaitu meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat. Dari sasaran misi 1 tersebut, ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar selama periode 5 tahun (2016-2021) yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Pencapaian tujuan didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol tahun 2016-2021. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun renja Badan Kesbangpol Tahun 2018.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. Pada tahun 2019, rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebesar 129,52% dengan kategori sangat baik, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II.18

Rata-rata capaian kinerja program kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah

Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB (76) | B(67,66) | 89,03% |
| Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | | | | | 89,03 |
| 2 | Meningkatnya keamanan, | 2. Jumlah konflik sosial di Sumbar | <5 | 3 | 140% |

| | | | | | |
|--|---|--|----|--------|----------------|
| | ketentraman dan ketertiban masyarakat | 3. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | 5% | 13,64% | 272,8% |
| Rata-rata Persentase Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | | 206,4% |
| 3 | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | 4. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 72 | 67,06 | 93,14% |
| Rata-rata Persentase Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat | | | | | 93,14% |
| Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja | | | | | 186,67% |

Capaian kinerja program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi kepala daerah berimplikasi pada capaian program nasional. Visi Misi Kepala Daerah disusun dengan mengacu pada visi misi RPJMN 2015-2019 dimana visi RPJMN 2015-2019 adalah ” *Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.* ” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 misi yaitu : 1). *Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,* 2). *Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum ,*3). *Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,* 4). *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,* 5). *Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,* 6). *Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ,* 7). *Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.*

Sesuai dengan visi pembangunan ‘*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,* maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup

sasaran makro, sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, sasaran pembangunan sektor unggulan, sasaran dimensi pemerataan, sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah serta sasaran hukum, politik, pertahanan dan keamanan. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sangat berperan dalam mewujudkan sasaran pembangunan manusia dan masyarakat dan sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan pada tabel berikut :

abel II.19

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

RPJMN 2015-2019

| No | Pembangunan | Baseline 2014 | Sasaran 2019 |
|---|------------------------------------|---------------|--------------|
| 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat | | | |
| Pembangunan Masyarakat | | | |
| d. | Jumlah Konflik Sosial | 164 (2013) | Menurun |
| 6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | | | |
| Politik dan Demokrasi | | | |
| 1 | Tingkat Partisipasi Politik Pemilu | 73,2% | 77,5% |
| 2 | Indeks Demokrasi Indonesia | 63,7 | 75 |

Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang pada RPJMN 2016-2019 adalah pembangunan manusia dan masyarakat yang indikatornya adalah jumlah konflik sosial.

Sasaran ini menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan diselaraskan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol selama 5 tahun. Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar, salah satunya yaitu persentase penurunan konflik sosial di Sumbar. Sasaran ini didukung oleh program-program prioritas yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba.

Pada tahun 2019, jumlah konflik sosial di Sumbar sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2016 (baseline) sebanyak 4 kasus, artinya terjadi penurunan jumlah konflik sosial dari tahun-tahun sebelumnya dan hal ini tentunya berimplikasi pada capaian sasaran pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan nasional selanjutnya yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol adalah sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang indikatornya adalah tingkat partisipasi politik Pemilu dan Indeks Demokrasi Indonesia. Sasaran ini juga telah diselaraskan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar selama 5 tahun yaitu meningkatnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar. Sasaran ini didukung oleh satu program prioritas yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat. Pada tahun 2019, nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar sebesar 67,06, turun 0,4 poin dari tahun 2016 (baseline). Penurunan ini tentunya juga berimplikasi terhadap capaian sasaran pembangunan nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

a. Tantangan

Tantangan dalam peningkatan pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera

Barat adalah :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam menunjang kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar
- b) Pengalokasian anggaran yang memadai untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan pra sarana kantor
- d) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam membangkitkan semangat nasionalisme.
- e) Meningkatkan rasa toleransi dalam kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
- f) Meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam berrpolitik
- g) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga katentraman dan ketertiban daerah.
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik
- i) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan

b. Peluang

- a) Adanya dukungan instansi terkait dalam melaksanakan tugas
- b) Adanya peningkatan dukungan kebijakan pemerintah / non pemerintah
- c) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- d) Adanya peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam

penyerapan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik

- e) Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f) Karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang hidup berlandaskan falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan, sehingga kemajemukan yang ada dalam masyarakat Minangkabau masih bisa dikelola dengan baik
- g) Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI serta pelibatan tokoh masyarakat dan ulama, senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar khususnya untuk meredam gejolak yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021.

Upaya mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Pelibatan seluruh *stakeholders* dalam penjangkaran informasi maupun melakukan koordinasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Jika kita melihat pada kondisi faktual, selalu ada saja pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dan memicu konflik. Dalam kerangka pemikiran ini, maka disusunlah analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Threads*) dalam merencanakan dan menjalankan strategi.

Pada tahun 2019, terkait dengan tugas dan fungsi Badan kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus

pemerintah daerah yakni :

1. Adanya potensi keterlambatan penyaluran kekurangan logistik dari pusat ke beberapa TPS yang terletak cukup terpencil di beberapa daerah di Sumbar seperti kabupaten Agam dan kabupaten Kepulauan Mentawai, jelang hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.
2. Pemasangan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak menimbulkan potensi konflik bagi masyarakat di sekitar Danau Singkarak. Masyarakat menilai bahwa mata jaring yang digunakan berukuran sangat kecil sehingga membuat seluruh ikan bilih terangkut saat dijaring. Hal ini dapat menyebabkan punahnya ekosistem ikan bilih di danau tersebut. Untuk mencegah potensi konflik lanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov. Sumbar bersama Lantamal II Padang melakukan operasi perairan secara berkala yang juga melibatkan Polairud. DKP mengharapkan segera diterbitkan Perda Prov. Sumbar yang mengatur tentang penertiban bagan dan KJA di Danau Singkarak.
3. Rencana reaktivasi jalur kereta api Padang – Pulau Air dan Padang – Bukittinggi masih berpotensi mengalami penolakan dari masyarakat karena di atas tanah yang akan dilalui rel tersebut berdiri beberapa bangunan masyarakat (rumah/ruko)
4. Terjadinya kerusuhan di Wamena pada tanggal 23 September 2019, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua berupa aksi pembakaran dan pengrusakan serta melakukan pengejaran terhadap warga Non-Papua termasuk terhadap warga Sumbar yang tinggal di daerah tersebut. Aksi ini dipicu oleh adanya provokasi berita bohong berbaur rasisme dikalangan masyarakat. Pasca insiden tersebut, 31 orang dinyatakan tewas dan 10 orang diantaranya merupakan warga Sumbar asal Pesisir Selatan. Pada tanggal 27 September 2019, Wakil Gubernur Sumbar didampingi beberapa pejabat terkait berkunjung ke Wamena untuk melihat

langsung kondisi para perantau Minang yang mengungsi di sejumlah titik. Berdasarkan kunjungan tersebut serta mempedomani data yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov. Sumbar, terdapat 1.470 orang warga Minang yang kini ada di Wamena dan sebagian besarnya menyatakan ingin kembali ke Sumbar dengan alasan keamanan. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 118 orang mahasiswa asal Papua yang belajar di Sumbar, dan umumnya mereka merupakan mahasiswa penerima beasiswa dari Dikti. Pemerintah provinsi Sumbar menghimbau tokoh tokoh masyarakat untuk mampu bersinergi dalam meredam situasi agar tidak ditunggangi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat memprovokasi suasana yang telah berangsur membaik. Perlu juga diwaspadai gerakan dari kelompok/ormas Islam garis keras yang ingin mengerahkan massa dengan tujuan 'jihad' ke Papua. Untuk Sumbar tidak ada indikasi tersebut karena umumnya warga Sumbar cukup rasional dalam menganalisa situasi, sehingga tidak terjadi semacam aksi balas terhadap warga Papua yang ada di Sumbar.

5. Maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP dan revisi UU KPK oleh pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa di Sumbar dilakukan sejak bulan September 2019 dengan berbagai macam tuntutan terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa terjadi di depan kantor kantor pemerintah daerah hampir di semua kabupaten/kota di Sumbar. Pada tanggal 25 September 2019, aliansi BEM se- Sumbar kembali melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD Prov. Sumbar di jalan Khatib Sulaiman, Padang. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK. Aksi semula berjalan dengan tertib. Sejumlah pimpinan DPRD Prov. Sumbar turun menemui mahasiswa untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi/tuntutan yang disampaikan. Pada sore hari, sejumlah perwakilan mahasiswa merangsek masuk ke ruang sidang utama dan mulai melakukan aksi aksi pengrusakan terhadap

fasilitas yang ada di dalam gedung. Aksi menjadi anarkis dan tak terkendali dan sejumlah oknum mahasiswa melakukan pengrusakan yang menyebabkan hampir semua prasarana di ruang sidang utama mengalami kerusakan berat. Kerugian yang ditaksir mencapai 1 milyar rupiah. Aparat keamanan berhasil membubarkan paksa aksi mahasiswa menjelang malam hari.

6. Masyarakat nagari Pelangai Gadang kecamatan Ranah Pesisir melaporkan aktivitas PT. DEMPO Sumber Energy yang sedang melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLMTH) di nagari Pelangai Gadang, kecamatan Ranah Pesisir. Masyarakat menduga PT. DEMPO melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin, yakni melakukan penambangan batu/bahan galian lainnya di sungai Pelangai Gadang. Menanggapi isu tersebut, Pemkab Pesisir Selatan dan Pemprov Sumbar sudah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan PLMTH oleh PT. DEMPO di kecamatan Ranah Pesisir. Bupati Pesisir Selatan bersama jajaran Forkopimda juga sudah melakukan peninjauan langsung bersama tokoh pemuda dan nagari setempat. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Bupati Pesisir Selatan menyatakan sejauh ini aktivitas PT. DEMPO sesuai dengan ijinnya.
7. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan perusahaan di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
8. Adanya 44 kapal pesiar yang berlayar di laut wilayah Sumatera Barat, yang terindikasi dimiliki oleh orang asing. Persoalan 44 kapal pesiar ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang melihat puluhan kapal berlayar di wilayah barat laut Sumbar, berkemungkinan menuju ke Kep. Mentawai atau Pesisir Selatan. Masyarakat/nelayan lokal melihat penumpang kapal didominasi oleh orang asing. Berdasarkan koordinasi dan pemantauan yang dilakukan, tim POA Prov. Sumbar menemukan bahwa kapal kapal ini kebanyakan berbendera Indonesia namun belum seluruhnya data pemilik kapal diperoleh. Hingga saat ini, pemerintah provinsi Sumbar masih melakukan koordinasi dengan Divisi

Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Sumbar serta Kantor Imigrasi Sumbar.

9. Pada bulan Juli 2019, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial N alias AZ, yang diduga terlibat dengan kelompok JAD jaringan Sumatera dan Jawa. Terduga teroris di tangkap di daerah Perintis Kemerdekaan, Jati, kecamatan Padang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui terduga teroris mengontrak rumah di daerah Berok, Nipah, kecamatan Padang Timur. Yang bersangkutan sudah lama dipantau oleh Densus 88, namun sejak bulan Agustus 2018, Densus 88 kehilangan jejaknya dan kasusnya kembali dikembangkan pada pertengahan 2019. Adapun hasil penyelidikan terhadap yang bersangkutan adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan terkait dengan kelompok teror *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pimpinan May Yusril bin Haji Umar bin Umar.
 - b. Yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan teroris di Sumatera
 - c. Yang bersangkutan telah melakukan pengamatan ke sejumlah pos polisi dan pusat keramaian di kota Padang untuk melakukan aksinya, namun tidak terealisasi.
10. Pada tanggal 20 Desember 2019, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap 2 orang terduga teroris di jorong Diponegoro, nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Penangkapan ini di *back up* oleh Polres Tanah Datar. 1 orang terduga teroris berinisial TT ditangkap di rumah kontrakannya dan 1 orang lagi berinisial DR ditangkap dirumah orangtuanya di Simpang Asrama Baringin. Penggeledahan rumah terduga teroris tersebut di *back up* oleh Polres Tanah Datar dan disaksikan oleh perangkat nagari Baringin dan unsur pemuda setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut diamankan dua buah golok, satu bungkus paku, 1 buah laptop dan 1 buah buku berjudul "Seberapa Hebat Kamu Membelah Islam". Kedua terduga teroris dibawa oleh Densus 88 untuk pengembangan lebih lanjut.
11. Masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan peredaran gelap

narkoba di Sumbar khususnya daerah perkotaan.

12. Maraknya isu *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)* yang melanda Sumatera Barat, yang terus dalam pemantauan Badan Kesbangpol Sumbar bersama jajaran terkait. Wakil Gubernur Sumbar menginstruksikan penerbitan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas LGBT di Sumbar.
13. Turunnya nilai IDI Sumbar tahun 2018 sebesar 2,44 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih serius kedepannya khususnya dari segi penguatan pokja IDI untuk mendorong peningkatan nilai pada aspek aspek dan indikator penilaian perilaku demokrasi masyarakat di Sumbar
14. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik aliran dalam kancah politik di daerah
15. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial;
16. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai;

Berdasarkan isu-isu strategis yang terjadi di sepanjang tahun 2019, penyelenggaraan tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk tahun 2021 difokuskan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Sumatera Barat dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Kesbangpol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
2. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Kesbangpol melalui pemetaan :

- Daerah rawan konflik sosial (pembuatan peta daerah rawan konflik berbentuk geospasial).
 - Isu terorisme (mewaspadaikan kelompok radikal seperti ISIS dan lainnya)
 - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
 - Pengawasan terhadap orang atau lembaga asing
3. Mensinergikan perbedaan visi dan misi serta langkah dan sikap antar jajaran Kesbangpol pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat kerja dan sosialisasi serta sinkronisasi kelembagaan.
4. Membentuk dan memberdayakan forum atau tim penanganan masalah bidang kesbangpol di kabupaten/kota seperti :
- Tim penanganan masalah strategis daerah
 - Tim pengawasan orang asing
 - Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat
 - Tim penelitian/verifikasi bantuan keuangan partai politik (khusus tingkat provinsi)
 - Forum kerukunan umat beragama
 - Forum kewaspadaan dini masyarakat
 - Forum pembauran kebangsaan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Jika dibandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan, pada rancangan awal Renja Kesbangpol Tahun 2021

sebagaimana yang terdapat dalam Renstra 2016-2021, pagu anggaran tahun 2021 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 10.446.000.00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah). Setelah dilakukan analisis, maka usulan alokasi pagu anggaran yang relevan untuk mendukung optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 12.556.100.000.- (Dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program program belanja langsung pokok dan program program belanja langsung urusan, dengan prioritas tambahan pada *output* maupun kegiatan yang sebelumnya tidak terakomodir dengan maksimal dalam usulan rancangan awal.

Prioritas alokasi usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) yang bertujuan untuk penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di daerah. Kondisi saat ini, keberadaan data ormas belum teridentifikasi seluruhnya sehingga belum ada informasi yang akurat mengenai jumlah ormas yang ada di daerah.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
3. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perlu diusulkan penambahan alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah, mengingat kondisi saat ini jumlah pemakai narkoba khususnya di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
4. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Pembentukan Gugus

Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam hal peningkatan pelaksanaan GNRM di Sumbar, pada tahun 2017 telah dibentuk tiga Gugus Tugas, yakni Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Bersatu, dan Gerakan Indonesia Melayani. Pembentukan ini difasilitasi oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemendikbud), bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

5. Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi untuk menindaklanjuti amanat Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah. Upaya ini perlu dilakukan untuk penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini.
6. Penguatan kelompok kerja (POKJA) Demokrasi Indonesia di daerah, untuk menaikkan nilai IDI Sumbar. Untuk menaikkan nilai IDI Sumbar di tahun 2021, dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai diantaranya untuk penguatan pokja IDI Sumbar, yang dibentuk pada tahun 2017. Peran pokja IDI Sumbar diantaranya mendorong peningkatan peran dan fungsi lembaga lembaga maupun dinas/perangkat daerah terkait di Sumbar, dalam menghasilkan kehidupan demokrasi yang baik di Sumbar.
7. Rehab Gedung Kantor Badan Kesbangpol Prov. Sumbar untuk pembangunan tempat ibadah (ruang shalat), ruang rapat dan tempat parkir yang kondisinya belum memadai sampai saat ini.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat pada Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel **T-C.31** (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan rancangan awal Renja Tahun 2021, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berencana akan melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada bulan Februari Tahun 2020. Namun, sehubungan dengan adanya penyebaran wabah covid-19, maka Forum Perangkat Daerah tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, untuk mengakomodir masukan maupun usulan kegiatan dari Kesbangpol kabupaten/kota untuk Kesbangpol Provinsi, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melakukan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota sehingga usulan program/kegiatan tersebut bisa diakomodir dalam Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga mengumpulkan informasi ke lapangan terkait hasil pelaksanaan Musrenbang kab/kota.

Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Ormas, OKP, serta partai politik yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi masyarakat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **Tabel T-C.32** (terlampir).

Berdasarkan tabel T-C.32, dapat dijelaskan bahwa secara umum, perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah mengusulkan beberapa kegiatan prioritas yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran di daerah khususnya kegiatan yang memiliki dampak langsung terkait pembangunan masyarakat di daerah diantaranya kegiatan peningkatan kesadaran bela negara, kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta pembauran kebangsaan. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilaksanakan di daerah mengingat semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebabnya adalah melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda. Kesbangpol di daerah mengharapkan agar pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah dengan dukungan dana dari APBD Provinsi. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan menurunnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan merupakan isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sehingga usulan kegiatan ini dituangkan dalam hasil analisis kebutuhan rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Selanjutnya, Kesbangpol Kabupaten/Kota juga mengusulkan kegiatan terkait pencegahan dan pemberantasan kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pelajar dan generasi muda di daerah, mengingat jumlah kasus maksiat dan angka penyalahgunaan narkoba di daerah masih sangat tinggi. Keterbatasan alokasi anggaran di daerah menyebabkan Kesbangpol Kab/kota tidak dapat melakukan sosialisasi bagi masyarakat di daerah secara maksimal dalam rangka pencegahan terhadap kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba di daerah sehingga Kesbangpol Kab/Kota mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut bagi masyarakat di daerah. Tingginya jumlah kasus maksiat dan angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar juga menjadi isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sehingga usulan kegiatan ini diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Kegiatan yang juga diusulkan untuk diakomodir dalam Renja Badan Kesbangpol

Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Ormas. Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan terhadap kegiatan prioritas di tingkat pusat yang mengamanatkan agar setiap daerah menyiapkan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi keormasan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (SIORMAS). Melalui kegiatan ini, diharapkan keberadaan data ormas di daerah dapat terpantau secara berkala dan aktivitas/kegiatan yang dilakukan ormas sebagai organisasi yang berpartisipasi dalam pembangunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini juga menjadi isu strategis terkait tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, karena aktivitas ormas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku justru akan menghambat pembangunan di Sumatera Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2015-2019

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah ” ***Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.***” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 misi yaitu : 1). *Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 2). Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum ,3). Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5). Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, 6). Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional , 7). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.*

Sesuai dengan visi pembangunan *Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Sasaran Makro

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
4. Sasaran Dimensi Pemerataan
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dari 6 (enam) sasaran utama RPJMN 2015-2019, yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah sasaran kedua dan sasaran keenam yaitu sasaran pembangunan manusia dan masyarakat dan sasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat terdiri atas beberapa indikator sasaran, salah satunya adalah pembangunan masyarakat dengan indikator kinerja jumlah konflik sosial (per tahun). Adapun sasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan juga terdiri atas beberapa indikator, salah satunya politik dan demokrasi dengan indikator kinerja tingkat partisipasi politik Pemilu dan Indeks Demokrasi Indonesia. Untuk mendukung sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program diantaranya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

B. Arah Kebijakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 arah kebijakan. Dari 10 arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yang pertama yaitu

menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi :

1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan
3. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan sasaran program yaitu meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya, terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun indikator kinerja program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi, radikal, isu separatisme, daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)
- b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA
- c. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu

Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan program dan kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

C. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 (tahap ketiga). Adapun visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.”*** Salah satu misi untuk pencapaian visi tersebut adalah ***Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, salah satu lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi

Kitabullah”

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di atas antara lain meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat. Salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian misi di atas adalah Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Prioritas ini diarahkan pada pelaksanaan kebijakan nasional di bidang revolusi mental, implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip revolusi mental, pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif di tengah kehidupan masyarakat, diharapkan akan dicapai :

1. Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja yang tinggi dan produktif
2. Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan cinta damai
3. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi
4. Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat
5. Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau
6. Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat
7. Penurunan perbuatan maksiat.

Kondisi di atas merupakan isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 yang memuat program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi

2. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan di sini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Tujuan : Meningkatnya kinerja organisasi

Sasaran : Meningkatnya tata kelola organisasi

Misi Kedua : Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat

Tujuan : Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat

Sasaran :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

Untuk uraian lebih lengkap mengenai tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan
Perkiraan Tahun 2022**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Target kinerja sasaran pada tahun ke | |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|
| | | | | | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (9) | (10) |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB | BB |
| 2 | Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat | Indeks Ketahanan Nasional | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar | <5 5% | <5 5% |
| | | | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 76 | 78 |

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

1) Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2016 – 2021.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada sasaran nomor 2 dan sasaran nomor 3 pada misi 1 RPJMD 2016 – 2021, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Sasaran 2 Misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama”. Program urusan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang sasaran 2 ini adalah :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat

2. Sasaran 3 Misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Berkurangnya penyakit masyarakat”. Program urusan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang sasaran 3 ini adalah :

- a. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- b. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

Kelima program urusan tersebut dilaksanakan untuk menunjang indikator kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu **tidak adanya konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) di Sumatera Barat.**

Adapun program non urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2) Uraian garis besar program dan kegiatan.

Pada tahun 2021, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merencanakan 5 program pokok yang terdiri dari 30 kegiatan dan 5 program urusan yang terdiri dari 28 kegiatan (total 10 program dan 58 kegiatan). Adapun 5 program urusan tersebut adalah :

a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Capaian program ini adalah konflik SARA (0 kasus) dan koordinasi antar pemuka

dan tokoh umat beragama (2 kali rapat/pertemuan/tahun) melalui pelaksanaan 8 kegiatan yaitu :

1) Penguatan Wawasan Bela Negara

Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah seminar bela negara bagi siswa SLTA/mahasiswa/generasi muda sebanyak 3 kali sosialisasi.

2) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pelatihan pendidikan wawasan kebangsaan sebanyak 3 kali pelatihan.

3) Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang

Kegiatan ini ditujukan untuk menginventarisir permasalahan idiologi dan wasbang di daerah serta memfasilitasi terbentuknya forum-forum strategis yang berkaitan dengan idiologi wasbang. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat kerja sebanyak 2 kali rapat dan monitoring evaluasi ke 19 kab/kota.

4) Pembangunan Karakter Bangsa dalam upaya mendukung Revolusi Mental

Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan revolusi mental di kalangan aparatur dan masyarakat serta terbentuknya gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi revolusi mental sebanyak 2 kali sosialisasi dan gugus tugas yang terbentuk sebanyak 2 gugus tugas.

5) Penguatan Pembauran Kebangsaan

Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi pembauran kebangsaan sebanyak 2 kali sosialisasi dan rapat tim Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 kali rapat.

6) Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pelatihan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebanyak 3 kali pelatihan.

7) Pembinaan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi (rakor) FKUB sebanyak 2 kali rakor, rapat tim FKUB sebanyak 4 kali rapat dan monitoring potensi konflik antar umat beragama di 19 kabupaten/kota.

8) Pembinaan dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang aliran/ajaran sesat dalam rangka mencegah atau berkembangnya aliran/ajaran sesat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi penanganan aliran kepercayaan masyarakat sebanyak 3 kali dan monitoring aliran kepercayaan di Sumbar di 19 kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Capaian program ini adalah konflik sosial (23 kasus) dengan pelaksanaan 10 kegiatan yaitu :

1) Penanganan masalah strategis daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebanyak 4 kali rapat dan terlaksananya monitoring evaluasi masalah strategis di 19 kab/kota

2) Pemantauan orang asing

Kegiatan ini ditujukan untuk memantau aktivitas atau keberadaan orang asing di Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat tim Pemantauan Orang Asing sebanyak 4 kali rapat dan terlaksananya monitoring evaluasi keberadaan orang asing di 19 kab/kota di Sumbar

3) Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap konflik serta penanganan konflik yang terjadi di Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring evaluasi potensi konflik di 19 kab/kota dan tersusunnya buku/dokumen pemetaan potensi konflik di daerah.

4) Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik yang terjadi di daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat tim FKDM sebanyak 4 kali rapat, rapat koordinasi (rakor) FKDM sebanyak 1 kali rakor, dan koordinasi dalam rangka pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah di 19 kab/kota.

5) Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat timdu PKS sebanyak 6 kali rapat, rakor timdu PKS sebanyak 1 kali rakor, monitoring Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/Kota di 19 kab/kota dan tersusunnya 3 laporan rencana aksi penanganan konflik sosial (B04, B08 dan B12).

6) Pengawasan dan pencegahan radikalisme

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya teroris. Keluaran dari kegiatan ini adalah monitoring potensi penyebaran radikalisme dan potensi aksi teror di daerah (19 kab/kota) dan pembekalan pencegahan aksi radikalisme dan potensi aksi terorisme di daerah sebanyak 1 kali.

7) Forum Diskusi Pimpinan Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda dalam penanganan isu-isu strategis di daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat dengan Forkopimda sebanyak 4 kali rapat dan monitoring isu strategis daerah dan pelaksanaan Forkopimda Kab/Kota di 19 kab/kota.

8) Pengawasan dan pengendalian ketahanan ekonomi

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik akibat gejolak ekonomi di daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat kerja sebanyak 3 kali rapat, rapat koordinasi (rakor) ketahanan ekonomi sebanyak 2 kali rakor dan terlaksananya monitoring evaluasi potensi konflik akibat gejolak ekonomi di 19 kab/kota.

9) Forkomkon jajaran kesbangpol provinsi dan kab/kota se- Sumbar

Kegiatan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi dan sikap aparatur jajaran Kesbangpol terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi (rakor) jajaran Kesbangpol sebanyak 1 kali rakor.

10) Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol se- Sumbar

Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi kelembagaan dan program kegiatan jajaran Kesbangpol dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di se-Sumbar. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi (rakor) jajaran Kesbangpol sebanyak 1 kali rakor.

3. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Capaian program ini adalah pemahaman aparatur dan pihak terkait (70%) melalui kegiatan pembekalan dan pembinaan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta diperingatinya Hari Anti Narkotika Internasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pembekalan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sebanyak 2 kali, peringatan HANI sebanyak 1 kali dan monitoring perkembangan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di daerah di 19 kab/kota.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Capaian program ini adalah menurunnya kasus penyakit masyarakat (70%) dan pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap perbuatan maksiat (50%) melalui kegiatan pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pembekalan pemberantasan

penyakit masyarakat sebanyak 5 kali dan monitoring perkembangan kasus maksiat di daerah di 19 kab/kota.

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Capaian program ini adalah peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui 8 kegiatan yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang etika, budaya dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pendidikan politik sebanyak 4 kali.

2) Pengelolaan bantuan keuangan partai politik

Kegiatan ini ditujukan untuk merealisasikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah parpol yang diverifikasi untuk memperoleh bantuan keuangan parpol sebanyak 16 parpol.

3) Sosialisasi dan pembinaan ormas

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman anggota Ormas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi tentang peraturan keormasan sebanyak 4 kali dan monitoring keberadaan/aktivitas ormas di daerah di 19 kab/kota.

4) Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur terkait undang-undang dan peraturan bidang politik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang

politik sebanyak 3 kali.

- 5) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang mengalami kekosongan. Keluaran dari kegiatan ini adalah persentase usulan berkas calon PAW anggota DPRD kabupaten/kota yang diverifikasi sebesar 100%.

- 6) Bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol sebanyak 1 kali bimtek dengan peserta sebanyak 80 orang.

- 7) Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rapat Pokja IDI sebanyak 2 kali rapat, jumlah sosialisasi hasil IDI sebanyak 3 kali dengan peserta sebanyak 300 orang.

- 8) Pemantauan perkembangan politik di daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan Pemilu. Keluaran dari kegiatan ini adalah rapat tim pemantauan perkembangan politik di daerah sebanyak 2 kali rapat dan pemantauan perkembangan politik di daerah di 19 kab/kota.

Adapun sebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai

berikut :

- a. Pada umumnya, kegiatan yang mendukung program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan di 19 kab/kota di Sumbar. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya berupa pemantauan ke kabupaten/kota terkait potensi konflik dan gangguan keamanan yang terjadi di daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Sumatera Barat.
- b. Untuk program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, selain melakukan pembinaan program kerja ke 19 kabupaten/kota, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga berupaya memfasilitasi pembentukan forum pembauran kebangsaan di dua belas kab/kota yang belum membentuk, yakni kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Sawahlunto, kabupaten Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman. Kegiatan-kegiatan yang berupa sosialisasi/pelatihan/pembekalan juga dilaksanakan di kab/kota yang memiliki keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut di daerahnya masing-masing.
- c. Untuk program pengawasan dan pencegahan penyakit masyarakat dan program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba akan dilakukan koordinasi dan pengumpulan data penyalahgunaan narkoba maupun data kasus penyakit masyarakat di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- d. Untuk program pendidikan politik masyarakat, akan dilakukan pendidikan politik di daerah dan pemantauan perkembangan politik di 19 kab/kota.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menunjang program kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sesuai dengan pagu indikatif pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah Rp. 10.446.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah). Namun setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk tahun 2020, maka total pagu yang diusulkan adalah Rp. Rp. 12.556.100.000- (dua belas milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2021 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel T-C.33** (terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 10 program yang terdiri dari 5 program rutin dan 5 program urusan
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah sebanyak 58 kegiatan yang terdiri dari 30 kegiatan dan 28 kegiatan urusan
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 secara total sebesar Rp. 10.446.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja serta penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan dalam satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya, renja akan selalu dievaluasi sekali dalam triwulan . Apabila terdapat ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan direvisi sesuai dengan hasil Analisa kebutuhan.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Oleh karena itu konsistensi dan tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyebarluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja kepada pegawai di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
2. Renja dilaksanakan dengan semua potensi dan penuh tanggung jawab serta diarahkan oleh Kepala Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan program/kegiatan.
3. Seluruh Pejabat eselon di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, agar mendukung pencapaian target kinerja dibawah perjanjian dan penetapan kinerja.
4. Seluruh pejabat eselon di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh pejabat eselon di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat agar segera menyusun kerangka acuan kerja dan SOP kegiatan setelah penetapan renja .

6. Program/kegiatan dalam renja adalah program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pejabat eselon di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Untuk pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, penyusunan SOP dan penyusunan Kerangka Acuan kerja tahun berikutnya.

Padang, 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Barat



NAZWIR, SH, M. Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19641111 199003 1 008